

Integrasi Kebijakan Pemerintah dan Tradisi Lokal dalam Mendorong Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Integration of Government Policy and Local Traditions in Encouraging Sustainable Agricultural Development

Heru Wicaksono ^{1*}

Iin Ismayanti ²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Banten

²Ilmu Pemerintahan, Universitas
Indonesia Timur, Makassar

email:

heruwicaksono@stiabanten.ac.id

Kata Kunci

Pertanian Berkelanjutan
Kearifan lokal
Kerjasama Kelembagaan

Keywords:

Sustainable Agriculture
Local wisdom
Institutional Collaboration

Received: November 2023

Accepted: November 2023

Published: November 2023

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi sinergi antara kebijakan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Sulawesi Barat. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan strategi modern, penelitian ini menyoroti peran strategis kelompok tani dalam pendampingan petani dan distribusi bantuan pertanian. Analisis mendalam mengungkapkan tantangan dalam harmonisasi kebijakan antarinstansi, termasuk kurangnya koordinasi efektif dan komunikasi yang terstruktur. Evaluasi terhadap sinergi kebijakan menunjukkan potensi untuk meningkatkan keberlanjutan pertanian melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan revitalisasi praktik pertanian berkelanjutan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam konteks pertanian di Sulawesi Barat.

Abstract

This research explores the synergy between local government policies, village governments and farmer groups in increasing agricultural productivity in West Sulawesi. Through an approach that integrates local wisdom with modern strategies, this research highlights the strategic role of farmer groups in assisting farmers and distributing agricultural aid. In-depth analysis revealed challenges in inter-agency policy harmonization, including a lack of effective coordination and structured communication. Evaluation of policy synergies shows the potential to improve agricultural sustainability through efficient resource management and revitalization of sustainable agricultural practices. The results of this research provide important insights for the development of more inclusive and sustainable policies in the agricultural context in West Sulawesi



© Year Author(s). Published by Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur <https://jurnal.uit.ac.id/IPE>. This is Open Access article under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) DOI: : <https://doi.org/10.36090>

PENDAHULUAN

Pengelolaan kemiskinan petani padi di Indonesia masih belum optimal, meskipun pemerintah telah mengalokasikan 20% dari dana desa untuk program ketahanan pangan. Implementasi program ini belum memadai dalam memberdayakan masyarakat tani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Fadlina et al., 2013). Kelembagaan desa memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dicatat dalam tujuan SDGs desa-18 yang menekankan pembangunan kelembagaan yang dinamis dan adaptif terhadap budaya lokal. (Fadlina et al., 2013)

Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan lembaga adat, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan (Dormauli et al., 2023; Harini et al., 2020). Hal ini membutuhkan manajemen yang lebih efektif terhadap hasil panen serta penguatan norma dan aturan yang memungkinkan petani untuk patuh terhadap pengelolaan yang dipimpin oleh lembaga adat. (Fikriman, Eci Prayetni, 2022; Sudalmi, 2010)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi serta menganalisis sinergi kebijakan publik dalam konteks ini. Fokus utama adalah integrasi qanun adat dan peran serta pemerintah desa dalam mendukung tata kelola pertanian yang berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan kerangka kerja yang lebih efisien dan mendukung, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kemajuan yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani memerlukan kolaborasi erat antara semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat lokal. Ini tidak hanya membutuhkan implementasi kebijakan yang tepat, tetapi juga pemahaman mendalam tentang dinamika lokal serta kebutuhan masyarakat petani (Aulya & Ariyani, 2017).

Peningkatan peran dan kualitas lembaga adat, seperti yang terlihat dalam kebijakan adat, dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan ini (Murhenna Uzra & Suparno, 2020). Hal ini menunjukkan pentingnya membangun kapasitas lokal dan meningkatkan dukungan terhadap lembaga-lembaga tradisional yang telah lama menjadi penjaga kearifan lokal dan pengaturan tata kelola wilayah. (* & Widodo, 2018; Wanta et al., 2021)

Selain itu, peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi koordinasi antar lembaga adat dan masyarakat sangat penting untuk menjamin kesinambungan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Sinergi antara kebijakan publik dan praktik lokal dapat menjadi pendorong utama dalam mengatasi tantangan kemiskinan di tingkat lokal, serta memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan hidup. (Meri et al., 2020)

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana sinergi kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks kelembagaan desa dan tata kelola pertanian yang berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menginterpretasi proses komunikasi dalam konteks kebijakan di Sulawesi Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan purposive sampling terhadap lima informan kunci,

termasuk Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Holtikural, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Dewan Adat, Koordinator Penyuluh Petani, dan Lembaga Adat. Data primer ini didukung oleh data sekunder dari dokumen resmi dan data statistik dari BPS serta referensi dari jurnal-jurnal nasional dan internasional. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan justifikasi administratif dan budaya sebagai pusat kehidupan masyarakat petani dengan nilai-nilai Islam di wilayah tersebut. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan verifikasi data sesuai dengan tema dan sub tema yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan penelitian, dengan pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan diskusi dengan teman sejawat untuk memastikan keakuratan dan keberagaman dalam perspektif data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Sinergitas Kebijakan Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pembangunan Pertanian

Pada konteks pembangunan pertanian di Sulawesi Barat, sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan lembaga adat memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Keterlibatan lembaga adat, seperti sistem pangaderangan atau lembaga adat lainnya, memungkinkan pemanfaatan kearifan lokal yang telah terbukti efektif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, kebijakan pertanian dapat lebih sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya setempat, meminimalkan risiko konflik antara kebijakan modern dengan nilai-nilai tradisional yang diyakini masyarakat adat.

Integrasi antara kebijakan pemerintah daerah dan lembaga adat juga menggalang partisipasi aktif masyarakat petani dalam proses pembangunan pertanian. Masyarakat lokal tidak hanya dianggap sebagai pelaku pasif dalam implementasi kebijakan, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pertanian. Partisipasi ini memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspirasi serta kebutuhan lokal yang beragam.

Selain itu, pendekatan ini mendukung terciptanya strategi pembangunan pertanian yang terencana dengan baik dan berkelanjutan. Dengan memadukan nilai-nilai tradisional yang bertumpu pada keberlanjutan ekologis dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, pemerintah daerah dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta memastikan bahwa pemanfaatan lahan pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Strategi ini juga memungkinkan adaptasi kebijakan pertanian yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan sosial, sehingga meningkatkan daya tahan sistem pertanian terhadap tantangan seperti perubahan iklim dan kebutuhan pasar yang berubah-ubah.

Tabel 1. Tipe pola sinergi antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam konteks pembangunan pertanian

Tipe Pola Sinergi	Deskripsi
Konsultasi dan Konsensus	Melibatkan dialog terbuka antara pemerintah daerah dan lembaga adat untuk mencapai pemahaman bersama dan kesepakatan terkait kebijakan dan program pembangunan pertanian.
Kolaborasi dalam Implementasi	Kerjasama aktif antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam pelaksanaan proyek-proyek pertanian, termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan dukungan teknis dari pemerintah.
Integrasi Kebijakan	Penyesuaian kebijakan pertanian pemerintah daerah dengan nilai-nilai dan praktik-praktik tradisional yang berlaku di masyarakat adat untuk mencapai tujuan keberlanjutan.
Penguatan Kapasitas	Program pendampingan dan pelatihan yang diselenggarakan bersama untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam mengelola sumber daya pertanian secara berkelanjutan.

Suber, hasi Penelitian 2024

Tabel di atas menggambarkan berbagai cara di mana sinergi antara lembaga adat dan pemerintah daerah dapat diimplementasikan dalam konteks pembangunan pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian dengan memanfaatkan kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat.

Secara keseluruhan, sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan lembaga adat di Sulawesi Barat mencerminkan upaya untuk menghadirkan pembangunan pertanian yang holistik dan inklusif. Dengan mengakui dan memanfaatkan kearifan lokal serta melibatkan aktif masyarakat petani dalam proses pembangunan, strategi ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta komunitas pedesaan secara keseluruhan. Peran Strategis Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Lembaga Adat

Analisis mendalam terhadap peran Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan lembaga adat dalam konteks ini mengungkapkan pentingnya kolaborasi dan koordinasi yang efektif di antara mereka. Dinas Pertanian bertanggung jawab atas implementasi teknis kebijakan pertanian, sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Lembaga adat, memiliki peran krusial dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional yang mendukung keberlanjutan pertanian. Koordinasi yang sinergis di antara ketiganya membantu mengatasi tantangan kompleks seperti pengelolaan sumber daya, perubahan iklim, dan peningkatan produktivitas secara holistik.

Tantangan dalam Sinergitas Kebijakan dan Implementasi Lembaga Adat

Meskipun pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat diakui, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya komunikasi intensif dan koordinasi yang terstruktur antara pemerintah daerah dengan lembaga adat. Selain itu, dukungan hukum yang jelas juga diperlukan untuk memastikan bahwa peran serta lembaga adat dalam kebijakan lokal diakui secara resmi dan diimplementasikan dengan efektif. Langkah-langkah ini menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap

langkah kebijakan dan program pembangunan pertanian dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat setempat.

Tabel 2. Tipologi Hambatan dalam sinergitas Pemerintah dan lembaga adat dalam pembangunan Pertanian

Tipologi Hambatan	Deskripsi
Perbedaan Persepsi dan Nilai	Konflik yang muncul karena perbedaan dalam pemahaman, nilai, dan prioritas antara pemerintah daerah yang berorientasi pada kebijakan modern dan lembaga adat.
Ketidaksesuaian Kebijakan	Kebijakan pertanian yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai dan praktik-praktik tradisional yang dianut oleh masyarakat adat.
Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi	Ketidakjelasan dalam komunikasi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam merencanakan dan melaksanakan program pertanian.
Keterbatasan Sumber Daya	Keterbatasan dana, personel, dan infrastruktur yang mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dan lembaga adat untuk melaksanakan program secara efektif.
Pertentangan Kepentingan	Interaksi yang rumit dan adanya pertentangan antara kepentingan politik, ekonomi, dan budaya di antara pemerintah daerah dan lembaga adat.

Suber, hasil penelitian, 2024

Dalam konteks pembangunan pertanian, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat sering kali terhambat oleh beberapa faktor utama. Pertama, perbedaan persepsi dan nilai antara kedua pihak dapat menciptakan konflik yang menghambat kolaborasi efektif. Pemerintah daerah cenderung mengutamakan kebijakan modern dan efisiensi ekonomi, sementara lembaga adat sering mengedepankan nilai-nilai tradisional dan keberlanjutan jangka panjang. Ketidaksesuaian ini sering kali menghalangi pencapaian tujuan bersama dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian, karena fokus yang berbeda-beda ini bisa mengaburkan upaya sinergis yang diperlukan.

Kedua, ketidaksesuaian dalam kebijakan pertanian juga menjadi hambatan yang signifikan. Ketika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak mempertimbangkan atau mengakomodasi nilai-nilai serta praktik tradisional yang dianut oleh masyarakat adat, hal ini dapat mengurangi dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat adat. Kurangnya integrasi kebijakan dengan praktik-praktik yang sudah ada juga dapat menghambat keberhasilan program pertanian yang berkelanjutan, karena tidak mampu memanfaatkan potensi dan kearifan lokal yang tersedia.

Selain itu, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat merupakan faktor lain yang sering menghambat sinergi dalam pembangunan pertanian. Ketidakjelasan dalam komunikasi serta kurangnya koordinasi dalam perencanaan dan implementasi program pertanian dapat menyebabkan redundansi, tumpang tindih, atau bahkan kesalahpahaman yang mengurangi efisiensi dan efektivitas program. Inisiatif sinergis yang baik membutuhkan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.

Terakhir, keterbatasan sumber daya seperti dana, personel, dan infrastruktur juga merupakan hambatan utama dalam melaksanakan program pertanian dengan baik. Pemerintah daerah dan lembaga adat sering menghadapi tantangan dalam mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung inisiatif sinergis dalam pembangunan pertanian. Ketika sumber daya terbatas, implementasi kebijakan dan program bisa menjadi terhambat, mengurangi kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pengembangan pertanian yang berkelanjutan.

Evaluasi dampak dari sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan lembaga adat terhadap keberlanjutan pertanian padi di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa koordinasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan memperkuat ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam teknik pertanian modern, program-program ini membantu meningkatkan produktivitas tanaman padi secara berkelanjutan. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek hasil pertanian, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat petani, yang merupakan indikator keberhasilan dari strategi sinergi dalam pengembangan sektor pertanian lokal.

Kelompok tani memiliki peran yang krusial dalam mendukung petani di Sulawesi Barat melalui berbagai kegiatan pendampingan dan distribusi bantuan pertanian. Mereka tidak hanya memberikan akses langsung kepada bibit dan peralatan pertanian tetapi juga menjadi wadah penting untuk sosialisasi dan edukasi tentang praktik tata kelola pertanian yang baik. Pendekatan ini memungkinkan penyuluh pertanian untuk efektif berinteraksi dengan masyarakat petani, meskipun mereka sering menghadapi kendala dalam komunikasi yang menyulitkan penetrasi informasi yang diharapkan. Sulitnya mendapatkan respons komprehensif dari masyarakat, yang kadang lebih memprioritaskan harapan akan hadiah atau bantuan langsung, menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih terarah dan terintegrasi antara pemerintah, lembaga adat, dan kelompok tani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga adat, dan kelompok tani adalah koordinasi yang belum optimal. Meskipun semua pihak memiliki peran masing-masing dalam mendukung pertanian, terdapat kesulitan dalam menyelaraskan kegiatan dan memastikan informasi terkait tata kelola pertanian tersampaikan secara efektif. Kendala ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi pelaksanaan kebijakan tetapi juga menurunkan potensi sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan komunikasi lintas sektor, pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, dan penguatan peran lembaga adat sebagai mediator komunikasi untuk mengatasi tantangan ini. Dengan meningkatkan harmonisasi antara semua pihak terlibat, diharapkan sinergi kebijakan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi ketimpangan di Sulawesi Barat secara berkelanjutan.

Kearifan lokal memiliki nilai krusial dalam pembangunan pertanian berkelanjutan dalam perspektif multi dimensi. Pertama, kearifan lokal mencakup pengetahuan dan praktik yang telah terakumulasi dari generasi ke generasi, yang sering kali mencakup cara-cara berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam. Hal ini memungkinkan masyarakat lokal untuk memanfaatkan tanah, air, dan sumber daya lainnya secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan sekitar, sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi dan keberlanjutan.

Kedua, kearifan lokal juga memperkaya diversitas budaya dan ekologis. Praktik-praktik tradisional dalam pertanian sering kali mempertimbangkan aspek-aspek budaya lokal, seperti ritual-ritual atau perayaan yang terkait dengan siklus musim pertanian. Ini tidak hanya memperkaya warisan budaya suatu masyarakat, tetapi juga membangun identitas yang kuat dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap upaya-upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kearifan lokal dapat menjadi basis untuk inovasi lokal dalam pertanian. Pengetahuan lokal tentang varietas tanaman, teknik pengendalian hama dan penyakit alami, serta praktik-praktik tradisional dalam pengelolaan tanah dapat memberikan landasan bagi pengembangan teknologi-teknologi baru yang sesuai dengan kondisi lokal. Ini menciptakan peluang untuk pengembangan pertanian yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan lingkungan serta ekonomi lokal.

Dalam perspektif ekonomi, kearifan lokal juga dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal. Masyarakat yang memiliki akses ke pengetahuan dan praktik tradisional yang kuat dalam pertanian cenderung lebih mandiri secara pangan, mengurangi ketergantungan terhadap input luar yang mungkin mahal atau sulit diakses. Ini berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi lokal dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat komunitas.

Secara keseluruhan, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan pertanian berkelanjutan tidak hanya memperkuat aspek lingkungan dan ekologis, tetapi juga memperkaya budaya lokal, mendukung inovasi teknologi, serta meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu mengakui dan mendukung peran penting kearifan lokal dalam merancang kebijakan dan program yang berkelanjutan di sektor pertanian, untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Simpulan

Pada konteks pembangunan pertanian di Sulawesi Barat, sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan lembaga adat adalah krusial untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Pendekatan ini tidak hanya mengintegrasikan aspek teknis dalam pengelolaan sumber daya pertanian, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai lokal dan partisipasi aktif masyarakat petani. Dengan menggabungkan kearifan

lokal dan kebijakan modern, strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan pertanian terencana dengan baik dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi lokal yang ada.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis mendalam terhadap mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan kelompok tani. Langkah ini meliputi peningkatan pemahaman tentang dinamika lokal, dukungan hukum yang lebih jelas untuk peran lembaga adat, serta integrasi lebih lanjut dari perspektif kearifan lokal dalam perencanaan kebijakan pertanian. Evaluasi yang komprehensif terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari sinergi kebijakan juga dapat memberikan wawasan mendalam untuk meningkatkan strategi pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Barat.

REFERENSI

- * H., & Widodo, E. (2018). KEARIFAN LOKAL DALAM MENGELOLA SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN DI LEMBAH SUNGAI SILENG PURBA KECAMATAN BOROBUDUR. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1). <https://doi.org/10.21831/socia.v14i1.19665>
- Aulya, M., & Ariyani, I. D. (2017). Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Konsep Ekoregion di Indonesia. *Jurnal Academia*, 15414058.
- Dormauli, H., Burga, S. E., Raytuy, G., Irene, T., Ermi, S., Bella, P., & Dwiky, R. (2023). Masyarakat Dayak Ngaju dalam Kearifan Lokal Pertanian Manugal. *Social Issues Quarterly*, 1(2).
- Fadlina, I. M., Supriyono, B., & Soeaidy, S. (2013). PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu). *J-Pal*, 4(1).
- Fikriman, Eci Prayetni, P. (2022). Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia. *Baselang*, 2.
- Harini, R., Aulia, D. N., Ningrum, E. C., Hanifah, K., Fitria, L., & Dewanti, T. (2020). Kearifan Lokal Pertanian, Permasalahan, dan Arah Strategi dalam Pengelolaan Pertanian di Desa Sembungan. *Majalah Geografi Indonesia*, 34(2). <https://doi.org/10.22146/mgi.32310>
- Meri, Kusuma, M., & Hayati, M. N. (2020). PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGETAHUAN KONTEN SAINS MELALUI PEMBELAJARAN IPA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA PERTANIAN BAWANG MERAH BREBES. *Jurnal Pendidikan MIPA Pancasakti*, 4(1).
- Murhenna Uzra, & Suparno. (2020). KEARIFAN LOKAL "HARI MATI DAN HARI IDUIK" DALAM KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PESISIR KENAGARIAN SUNGAI PINANG KABUPATEN PESISI SELATAN. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 2(1). <https://doi.org/10.56670/jsrd.v2i1.11>
- Sudalmi, E. S. (2010). Pembangunan pertanian berkelanjutan. *INNORFARM: Jurnal Inovasi Pertanian*, 9(2).
- Wanta, Lestari, O. I., Hayatun, N., & Rizkyah, N. (2021). Modernisasi Pertanian Berdasarkan Kearifan Lokal. *Jurnal Perspektif Lokal*, 9(1).